

## Edukasi Penggunaan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Non-Formal di Desa Perbarakan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

### *Education on the Use of BPJS Health for Non-Formal Communities in Perbarakan Village Deli Serdang Regency in 2024*

Aya Sofia Diaz<sup>1\*</sup>, Okto Hebron<sup>2</sup>, Rahmad Ramadhan Ritonga<sup>3</sup>, Putri Sari Maharani<sup>4</sup>, Sri  
Ulina Br. Purba<sup>5</sup>, Regina Elianda Tampubolon<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam  
Jln. Jenderal Sudirman No. 38 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Indonesia (20512)

#### Abstrak

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang didirikan atas dasar asas keadilan sosial, manfaat, dan kemanusiaan, tengah berupaya membangun suatu program bagi masyarakat Indonesia yang disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan sebagai lembaga nirlaba untuk mengelola program jaminan sosial Negara. Masyarakat secara keseluruhan mungkin belum sepenuhnya memahami pelaksanaan program BPJS karena rendahnya tingkat sosialisasi dan pemahaman tentang program kesehatan tersebut. Masyarakat belum sepenuhnya menjadi peserta BPJS, terutama mereka yang bekerja di daerah pedesaan atau sebagai buruh informal (petani atau buruh), karena belum semuanya terdaftar atau memiliki kartu BPJS. Tujuan pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat non-formal mengenai pentingnya memiliki BPJS Kesehatan sebagai bentuk perlindungan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses, memotivasi masyarakat non-formal untuk bergabung dalam program BPJS kesehatan, serta mendukung peningkatan akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan berkualitas melalui pemanfaatan fasilitas BPJS kesehatan. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Perbarakan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 20 orang masyarakat yang turut hadir. Kegiatan ini efektif dalam memberdayakan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas melalui BPJS Kesehatan, meskipun masih diperlukan dukungan berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada.

**Kata Kunci:** Edukasi; BPJS Kesehatan; Pengabdian.

#### Abstract

The Social Security Administering Agency (BPJS), which was established on the basis of social justice, benefits, and humanity, is trying to build a program for the Indonesian people called the National Social Security System. In accordance with Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, the Social Security Administering Agency (BPJS) was established as a non-profit institution to manage the State's social security program. The community as a whole may not fully understand the implementation of the BPJS program due to the low level of socialization and understanding of the health program. The community has not fully become a BPJS participant, especially those who work in rural areas or as informal laborers (farmers or laborers), because not all of them are registered or have a BPJS card. The purpose of community service is to provide an understanding to the non-formal community regarding the importance of having BPJS Health as a form of affordable and easily accessible health protection, to motivate the non-formal community to join the BPJS health program, and to support increased access for rural communities to quality health services through the use of BPJS health facilities. Community service was carried out in Perbarakan Village, Deli Serdang Regency, with 20 people attending. This activity is effective in empowering the community to access affordable and quality health services through BPJS Kesehatan, although ongoing support is still needed to overcome existing obstacles.

**Keywords:** Education; BPJS Kesehatan; Community Service.

\* Corresponding author: Aya Sofia Diaz, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang, Indonesia

E-mail : [ayadiazsofia@gmail.com](mailto:ayadiazsofia@gmail.com)

Doi : 10.35451/jpk.v4i2.2400

Received : December 09<sup>th</sup>, 2024; Accepted: December 29<sup>th</sup>, 2024; Published: December 30<sup>th</sup>, 2024

Copyright: © 2024 Aya Sofia Diaz. Creative Commons License This Work is licensed under a Creative Attributive 4.0 International License.

## 1. PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), berusaha untuk menggerakkan seluruh negara dalam membangun jaminan kesehatan masyarakat yang disebut *Universal Health Coverage* (UHC). Cakupan Kesehatan UHC berarti semua orang mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas yang dibutuhkan, kapan dan dimana pun mereka butuhkan, tanpa kesulitan keuangan [1]. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka semua masyarakat di negara tersebut adalah peserta jaminan kesehatan [2].

Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah jaminan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hidup. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang didirikan atas dasar asas keadilan sosial, manfaat, dan kemanusiaan, tengah berupaya membangun suatu program bagi masyarakat Indonesia yang disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan sebagai lembaga nirlaba untuk mengelola program jaminan sosial Negara [3].

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi layanan perorangan yang meliputi layanan preventif dan promotif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk penyediaan obat dan alat kesehatan sekali pakai. Layanan kesehatan berupa manfaat medis dan non-medis [4].

Program jaminan kesehatan nasional dijalankan berdasarkan asas asuransi sosial dan pemerataan, dan strukturnya adalah gotong royong, di mana individu yang sehat dan mampu membantu yang sakit dan tidak mampu. Meskipun demikian, program JKN masih memiliki reputasi yang buruk di masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan mungkin belum sepenuhnya memahami pelaksanaan program BPJS karena rendahnya tingkat sosialisasi dan pemahaman tentang program kesehatan tersebut. Masyarakat belum sepenuhnya menjadi peserta BPJS, terutama mereka yang bekerja di daerah pedesaan atau sebagai buruh informal (petani atau buruh), karena belum semuanya terdaftar atau memiliki kartu BPJS [5].

Mayoritas penduduk yang berada di kelompok penderita berbagai penyakit dan kondisi kesehatan. Ada bukti kuat bahwa kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, seperti jenis kelamin, ras, pekerjaan, tingkat ekonomi, dan pendidikan. Status kesehatan berbagai kelompok sosial sangat bervariasi di semua negara, terlepas dari tingkat pendapatan. Risiko kesehatan seseorang meningkat seiring dengan kelas sosial mereka. Ketimpangan sistematis dalam status kesehatan berbagai kelompok demografi dikenal sebagai ketimpangan kesehatan. Baik individu maupun masyarakat menanggung konsekuensi sosial dan finansial yang berat sebagai akibat dari ketimpangan ini [6].

Badan penyelenggara sistem jaminan sosial kesehatan bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing yang telah berada di negara ini selama lebih dari enam bulan. Masyarakat miskin, yang iurannya ditanggung pemerintah, dan yang bukan peserta ASKES atau penerima manfaat semuanya tercakup dalam Program Bagi Hasil (PBI) bagi peserta BPJS. Pada tanggal 1 Januari 2014, Indonesia mulai menerapkan BPJS. Pada tanggal 31 Desember 2013, namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 24 pada tahun 2011 PT, BPJS. Indonesia menggunakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lalu beralih ke BPJS kesehatan untuk kesehatan setiap individu dideklarasikan pada tanggal 1 Januari [7].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap BPJS Kesehatan dan mengkonstruksi konsep penerapannya di Padukuhan Kejambon Kidul, Sindumartani, Sleman. Berdasarkan edukasi yang dilakukan melalui media leaflet, masih banyak masyarakat yang belum mendaftar BPJS Kesehatan karena belum mengetahui tata cara pendaftaran dan pemutakhiran data. Kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan meningkat dengan adanya edukasi ini [8].

Mayoritas masyarakat di desa Perbarakan mereka bekerja di sektor informal, namun masih belum sepenuhnya memahami atau memanfaatkan program BPJS Kesehatan, meskipun pemerintah telah menggalakkannya sebagai upaya untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Kendala utamanya adalah kurangnya pengetahuan, sosialisasi, dan pemahaman tentang proses dan manfaat BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam mencapai cakupan kesehatan universal, diperlukan inisiatif pendidikan dan pendampingan yang ekstensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam skema jaminan kesehatan ini [9].

## 2. METODE PELAKSANAAN

Hasil yang telah dipaparkan diatas menghantarkan seluruh tim pelaksana untuk menghasilkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Keperuntukkan kegiatan ini nantinya masyarakat memahami tentang Penggunaan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Non-Formal di Desa Perbarakan. PkM ini dilaksanakan selama 2 hari dimulai tanggal 29 November 2024 - 30 November 2024 di Desa Perbarakan. Metode dalam pelaksanaan aktivitas PkM ini dimulai dengan melakukan survey awal pendataan penggunaan BPJS kesehatan berjumlah 20 masyarakat; Berkomunikasi dengan pemerintah desa atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan izin, dukungan, dan informasi tentang kelompok sasaran; Lalu melakukan observasi secara langsung dengan memberikan sosialisasi maupun edukasi yang relevan, seperti panduan pendaftaran BPJS Kesehatan, manfaat program, dan tata cara penggunaan layanan media seperti *leaflet*, poster, dan presentasi interaktif. Serta bentuk tim pelaksana yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kesehatan lokal untuk membantu dalam kegiatan.

## 3. HASIL

Berdasarkan hasil pemberian edukasi diperoleh data bahwa sebagian besar masyarakat Desa Perbarakan sudah memiliki BPJS kesehatan namun sudah tidak bisa digunakan atau kadaluarsa dikarenakan tidak melakukan perbaharuan data. Selain itu diperoleh data bahwa sebagian lainnya belum memiliki BPJS dikarenakan berbagai kondisi, berikut merupakan tabel masyarakat Desa Perbarakan yang belum mempunyai BPJS kesehatan beserta alasannya, terlampir pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data Masyarakat Desa Perbarakan

No	Inisial Responden	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Alasan Belum Mempunyai BPJS Kesehatan
1	TS	L	50	Kondisi ekonomi
2	CH	L	43	Mengandalkan pengobatan tradisional
3	ES	L	46	Kondisi ekonomi
4	SN	L	43	Kondisi ekonomi
5	HS	P	44	Kondisi ekonomi
6	SW	P	40	Mengandalkan pengobatan tradisional
7	WI	P	39	Mengandalkan pengobatan tradisional
8	SS	P	38	Tidak mengetahui status atau manfaat BPJS
9	SN	P	39	Kondisi ekonomi
10	NW	P	39	Kondisi ekonomi
11	LT	P	37	Kondisi ekonomi
12	AM	P	38	Tidak mengetahui status atau manfaat BPJS
13	KS	P	32	Merasa sehat dan tidak memerlukan BPJS
14	YT	P	35	Merasa sehat dan tidak memerlukan BPJS
15	IF	P	33	Kondisi ekonomi
16	SG	P	30	Merasa sehat dan tidak memerlukan BPJS
17	EK	P	30	Tidak mengetahui status atau manfaat BPJS
18	PB	P	31	Kondisi ekonomi
19	SA	P	29	Kondisi ekonomi
20	SD	P	28	Kondisi ekonomi

#### 4. PEMBAHASAN

Kesehatan masyarakat bergantung pada literasi informasi saat menggunakan layanan BPJS kesehatan, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham menggunakan layanan tersebut. Narasumber menegaskan agar seluruh fasilitas kesehatan segera memberikan pelayanan gawat darurat kepada peserta. Setelah keadaan gawat darurat ditangani dan pasien siap dipindahkan, peserta yang mendapatkan pelayanan medis di fasilitas non-BPJS harus diarahkan ke fasilitas mitra. UU No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial juga memuat ketentuan terkait hal ini [10]. Dengan mengetahui alur kepesertaan dan layanan BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS, serta layanan kegawatdaruratan yang tersedia bagi peserta BPJS. Bagaimana seseorang bereaksi terhadap sesuatu dan rangsangan tercermin dalam sikap dan perilakunya [11]. Faktor yang mempengaruhi sikap maupun perilaku adalah pengetahuan pribadi. Penyebaran pesan dan menumbuhkan rasa percaya diri merupakan dua cara yang dilakukan dalam melakukan edukasi kesehatan. Selain menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan, hal ini membuat masyarakat lebih cenderung untuk mengikuti anjuran kesehatan [12].

Hasil pengmas ini merujuk pada [13] disimpulkan bahwa konsultasi pemanfaatan pelayanan kesehatan BPJS untuk mencapai kesehatan masyarakat melalui metode ceramah dan *Focus Group Discussion* (FGD) dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Lakala Palanga Selatan. Desa, Provinsi Kono Selatan. Diharapkan Pemerintah daerah dan Puskesmas Kabupaten Palanga Selatan dapat melakukan tes kepada seluruh masyarakat untuk mengcover kepesertaan BPJS.

Hasil pengabdian lain yang dilakukan oleh [14] masih terjadinya permasalahan aplikasi *Mobile JKN* terhadap antrian panjang masyarakat yang hendak menyelesaikan semua urusan BPJS kesehatan, menjadi hal yang perlu di evaluasi dengan solusi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat memiliki tujuan memberikan edukasi mengenai penggunaan aplikasi *Mobile JKN*. Metode yang dilakukan adalah edukasi, *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan ini dilakukan di SMA 11 Kota Jambi sebanyak 40 orang. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa stakeholder sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini.



Gambar 1. Edukasi Penggunaan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Non-Formal di Desa Perbarakan

#### 5. KESIMPULAN

Masyarakat non-formal memahami bagaimana cara mendaftar, memperoleh hak maupun kewajiban sebagai pengguna BPJS Kesehatan, serta prosedur klaim manfaat [15]. Edukasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan sebagai upaya perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan yang tidak terduga, terutama bagi kelompok non-formal yang berpenghasilan tidak tetap. Kegiatan ini efektif dalam memberdayakan masyarakat pada akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas melalui BPJS Kesehatan, meskipun masih diperlukan dukungan berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang telah memberikan sokongan dana terhadap program pengmas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Perbarakan telah memperkenankan saya dan tim melakukan pengmas. Harapannya PkM ini dapat berfaedah bagi bibliofil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nabila Andriani, F. (2024). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Masyarakat Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024 (*Doctoral dissertation*, Universitas Mohammad Husni Thamrin).
- [2] Purba, R., Simangunsong, R. A., Putri, D. H., & Gurning, F. P. (2024). Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Masyarakat pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1363-1370.
- [3] Indonesia, R. (2024). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional*. Timur Putra Mandiri.
- [4] Lestari, T. R. P. (2020). Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Di Puskesmas Melalui Pendekatan Manajemen Sumberdaya Manusia Kesehatan. *Kajian*, 23(3), 157-174.
- [5] D. K. R. Indonesia, "Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014," 2014.
- [6] Hadi, A., Dimuru, L., & Rumau, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Puskesmas Kecamatan Geser Kabupaten Seram Bagian Timur). *Journal Administration and Public Service*, 1, 15–23. [http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index %0A](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index%0A).
- [7] Presiden Republik Indonesia. (2020). Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136650/perpres-no-64-tahun-2020>.
- [8] Ningsih, E. S., Ningsih, D. F., Saryanto, F. S., Larasati, I., Nurvirginawati, A., Aisyah, N. A., ... & Hidayah, N. (2022). Edukasi BPJS Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dusun Kejambon Kidul terhadap Asuransi Kesehatan. *Bangun Desa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9-13.
- [9] Kur'aini, S. N., Anggraini, A. N., & Ariagita, A. P. (2024). Sosialisasi Kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan bagi Masyarakat di RW 29, Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta. *Science and Technology: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 281-289.
- [10] Pritami, R. F., Al Rajab, M., Andilah, S., Harun, M. F., Kurniawan, F., Kurniawati, F., ... & Lisawati, L. (2023). Edukasi Penggunaan Layanan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Di Kecamatan Lakara Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *BARAKATI: Journal of Community Service*, 1(2), 44-52.
- [11] Nurhayani, & Rahmadani, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Pasien BPJS Kesehatan Di Puskesmas Mamasa, Puskesmas Malabo Dan Puskesmas Balla Kabupaten Mamasa. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 15–22.
- [12] Basuki, N., Sidayat, M., Nurdiyanawati, D., Karmila, I., Kaddas, F., Dewi, F. K., Kusuma, E., & Suhardi. (2022). BARAKATI: *Journal of Community Service* Penyuluhan Pengasapan Ikan Cakalang Menggunakan Asap Cair BARAKATI: *Journal of Community Service*. BARAKATI: *Journal of Community Service*, 01(1), 26–30.
- [13] Wardiah, R., Izhar, M. D., Butar, M. B., & Minarni, M. (2023). Edukasi Penggunaan Aplikasi *Mobile JKN* Dalam Upaya Memudahkan Akses Pelayanan Kesehatan (BPJS KESEHATAN) Di SMA N 11 KOTA JAMBI. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 25-31.
- [14] Lumi, W. M., Musak, R. A., Tumiwa, F., Waworuntu, M. Y., & Surya, W. S. (2023). Aplikasi *Mobile JKN* Edukasi Tentang Penggunaan Aplikasi *Mobile JKN* Pada Pasien Rawat Jalan RSUD Anugerah Tomohon. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1620-1626.
- [15] Fadlyansyah, M. (2023). Analisis Pelayanan Atas Keterlambatan Iuran Pada Anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPJS Kesehatan KC Utama Bandar Lampung) (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).